DAFTAR PUSTAKA

Siti Resmi.2003.*Perpajakan*.Jakarta:Salemba Empat

Siti Resmi. *Perpajakan, Teori dan Kasus*. Cet LJakarta, Salemba empat 2003

Mardiasmo.2003. *Pengantar Perpajakan*. Yogyakarta:ANDI YOGYAKARTA

Hardi. 2006. *Analisis dan desain sistem informasi*: Pendekatan terstruktur teori dan praktek aplikasi bisnis. Yogyakarta: ANDI

Tony Marsyahrul. 2006. **Pengantar Perpajakan**. PT.Grasindo: Jakarta.

http://belajarpajak.com/2009/11/13/bagaimana-menghitung-ppn-yang-terutang/

http://belajarpajak.com/2009/11/11/tarif-ppn/

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 536/KMK.04/2000 tanggal 2 Desember 2000 tentang Tata cara penerimaan dan pengolahan Surat pemberitahuan s.t.d.d Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/KMK.03/2003.

Keputusan Diektorat Jenderal Pajak Nomor KEP-207/PJ/2001 tanggal 12 Maret 2001 tentang kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.

Keputusan Diektorat Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang keterangan dan atau Dokumen lain yang Harus Dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan.

Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-215/PJ/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Tata Cara Penerimaan Surat Pemberitahuan.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ/2006 tanggal 6 November 2006 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).